

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjadi acuan dalam lima tahun kedepan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, sejak Prabencana, Saat Bencana dan Pascabencana.

Kami merasa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih belum sempurna, karena harus mengakomodir semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaannya mudah untuk dikoordinasikan. Selanjutnya kedepan bila ada kekurangan akan disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagedakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait dengan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini yang diharapkan efektif selama lima tahun, sesuai dengan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu instansi dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut untuk mempunyai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan serangkaian Program dan Kegiatan yang mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya.

Demikian akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Kuala Tungkal, Februari 2019

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. KOSASIH
NIP. 19591230 198103 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Maksud Dan Tujuan 2

1.4 Gambaran Umum SKPD 6

1.5 Strategik Issused (Permasalahan Utama) 9

1.6 Sistematika Penulisan 10

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis 12

2.2 Perencanaan Kinerja 15

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 19

3.3 Realisasi Anggaran 23

BAB IV : PENUTUP 25

LAMPIRAN

Mgosoft PDF Split Merge

Mgosoft PDF Split Merge

An. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sekretaris

SUPRAPTO, SH
Pembina TK. I
NIP. 19620116 198903 1 006

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Drs. H. KOSASIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19591230 198103 1 008

Mgosoft PDF Split Merge

Mgosoft PDF Split Merge



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan. Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran diubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review, merupakan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Dimana pada tahun 2017 fungsi bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pemerintah yang memerlukan suatu antisipasi dengan kebijakan-kebijakan agar undang-undang tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga dalam pelaksanaannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Laporan pertanggung jawaban yang menggambarkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Kebakaran di Perkotaan;



18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Tekonstruksi Pasca Bencana;
20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Resiko Bencana.
22. Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi data Kebencanaan;
23. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5); jo Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 tahun 2012;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 25).
30. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 33);



31. Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 050/2080/ Bappemdal tentang Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Adapun tujuan dari penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Maksud dan Tujuan dari pembuatan SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Melaporkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018.

1.4 Gambaran Umum SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas dan fungsi, sebagai organisasi yang menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mempertanggungjawabkan kinerja mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut;

1.4.1 Kedudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5); dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012; Mempunyai kedudukan sebagai berikut:



- a. Badan Penanggulangan Bencana adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di Bidang Penanggulangan Bencana.
- b. Badan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berubah menjadi Perangkat Daerah Badan Penanggualangan Bencana yang mempunyai;

1. Tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Melaksanakan penanggulangan bencana di daerahnya;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai

2. fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;



- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

3. Struktur Organisasi

Adapun Stuktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

(A) Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah

(B) Unsur Pengarah

(C) Unsur Pelaksana, terdiri dari :

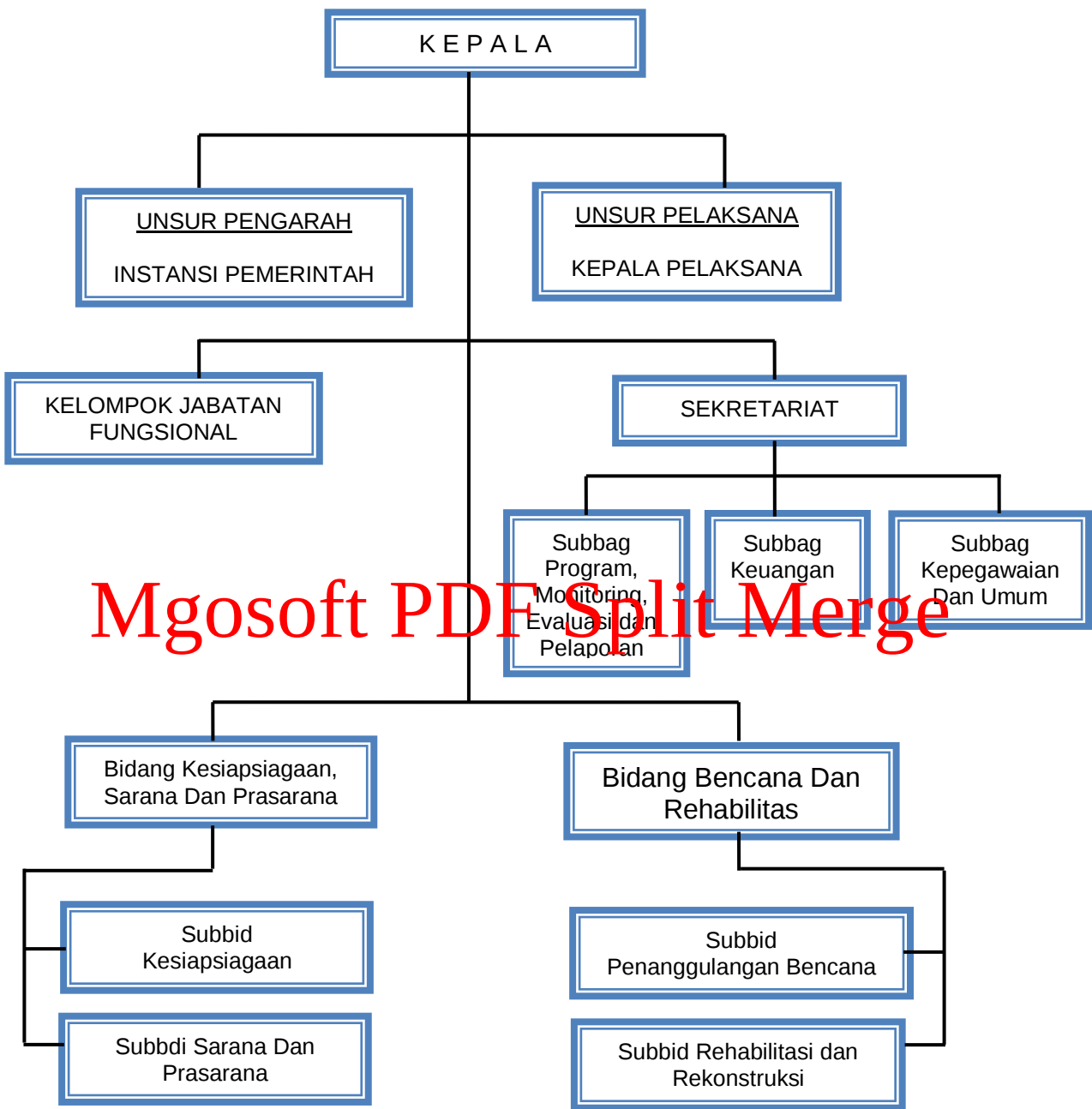
1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdiri dari ;
 - a. Subbag Keuangan
 - b. Subbag Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana
 - a. Subbid Kesiapsiagaan
 - b. Subbid Sarana dan Prasarana
4. Bidang Bencana dan Rehabilitasi
 - a. Subbid Penanggulangan Bencana
 - b. Subbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Mgosoft PDF Split Merge

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada bagan berikut:



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



1.4.3 Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 85 orang terdiri dari 23 orang PNS dan 62 orang satgas TKS/TKK. Adapun susunan kepegawaian berdasarkan status pangkat/gol dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut;



Tabel 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pangkat/Gol

No	Status Pegawai	Pangkat	Gol	Jumlah
1.	P N S	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	P N S	Pembina Tk. I	IV/b	1
3.	P N S	Pembina	IV/a	3
4.	P N S	Penata Tk.I	III/d	3
5.	P N S	Penata	III/c	3
6.	P N S	Panata Muda Tk.I	III/b	-
7.	P N S	Penata Muda	III/a	2
8.	P N S	Pengatur Tk.I	II/d	-
9.	P N S	Pengatur	II/c	4
10.	P N S	Pengatur Muda Tk.I	II/b	3
11.	P N S	Pengatur Muda	II/a	3
12.	P N S	Juru Tk.I	I/d	-
13.	P N S	Juru	I/c	-
14.	P N S	Juru Muda Tk.I	I/b	-
Jumlah				23
15.	Honorer/TKS/TKK	-	-	14
16.	Honorer/THL	-	-	48
Jumlah Total				85

Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Mgosoft PDF Split Merge

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	-
2.	S1	10
3.	D 3 / Diploma 3	1
4.	SLTA / Sederajat	12
5.	SLTP/Sederajat	-
Jumlah		23

1.5 Strategik Issused (Permasalahan Utama)

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Badan Pennggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah dan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut ;

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Belum memadainya aturan yang mengatur penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada. Rencana Aksi Daerah, Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku;



3. Belum memadainya kinerja pelayanan dan kapabilitas sumber daya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam hal pelaksanaan tahapan penanggulangan bencana;
5. Belum memadainya struktur organisasi badan bepanggulangan bencana dan perlu disempurnakan;
6. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di semua wilayah terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Gambaran Umum SKPD

1.4.1 Kedudukan

1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1.4.3 Sumber Daya Aparatur

1.5 Strategik Issused (Permasalahan Utama)

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana

2.1.2 Tujuan

2.1.3 Sasaran

2.1.4 Strategi, Arah Kebijakan Daerah dan Program

2.2 Perencanaan Kinerja



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Membandingkan antara target kinerjadan realisasi kinerja tahun ini (Tabel).

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Tabel).

3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

3.1.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1) Sumber daya manusia

2) Sumber daya peralatan

3) Sumber daya keuangan

3.1.5 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 3.2.1

Mgosoft PDF Split Merge

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif.

2.1.1 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana

Mengacu pada visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka visi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Layanan Penanggulangan Bencana yang Tangguh dan Profesional”

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggung jawab mengoptimalkan koordinasi dan secara profesional memberikan pelayanan penanggulangan bencana dengan mendorong upaya keterlibatan dan partisipasi masyarakat/stakeholders dalam meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta membangun kesadaran masyarakat/stakeholder dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur dan satuan tugas penanggulangan bencana.
- 2) Meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.



- 3) Meningkatkan upaya penyediaan sarana dan prasarana layanan penanggulangan bencana;
- 4) Memberikan pelayanan yang profesional dan tangguh dalam penanggulangan bencana baik pada pra, saat, dan pasca;
- 5) Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana;

Upaya pencapaian misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang sinergis antar lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat, sehingga terwujud pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

2.1.2 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana serta dampak bencana;
2. Melaksanakan tanggap darurat dalam penyelamatan dan evakuasi korban dan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat korban bencana;
3. Mengembangkan sumber daya aparatur penanggulangan bencana ;
4. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai;
5. Melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi dan budaya sadar bencana kepada masyarakat;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan serta partisipasi seluruh stakeholder dan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
7. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan Instansi terkait serta *stakeholders* berkaitan dengan bidang kebencanaan.

2.1.3 Sasaran

Sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi terwujudnya tujuan yang telah dirumuskan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021 adalah:

1. penyelamatan, evakuasi korban dan penanganan pengungsi akibat bencana;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat Meningkatnya dalam penanggulangan bencana;
3. Peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan,
4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung.



5. Terwujudnya desa siaga bencana;
6. Terwujudnya interaksi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
7. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
8. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui, dan peningkatan sistem logistik;
9. Terselenggaranya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah bencana;
10. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas fasilitasi di tingkat pusat dan daerah.

2.1.4 Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mewujudkan upaya penyelenggaraan layanan penanggulangan bencana, sangat diperlukan suatu rencana strategis penanggulangan bencana yang berkualitas serta kebijakan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Strategi yang akan dilaksanakan

- 1) Menyediakan Sumber daya aparatur yang bersertifikat, handal dan terlatih dalam penanggulangan bencana;
- 2) Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana di tingkat Kabupaten;
- 3) Mengadakan/membeli sarana dan prasarana penanggulangan bencana baik melalui dana APBD maupun APBN serta membuat proposal permohonan bantuan Sarpras ke BNPB;
- 4) Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
- 5) Kaji cepat dan kaji tepat penanggulangan bencana

2. Kebijakan yang akan dilaksanakan

- 1) Mengikutsertakan SDM bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana
- 2) Mengembangkan SDM berbasis kompetensi;
- 3) Mengembangkan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan;
- 4) Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah berisiko rawan bencana;



- 5) Pembentukan SK Bupati Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten
- 6) Penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.
- 7) Memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Perencanaan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana, responitas dalam pengamanan bencana dan meningkatkan pemulihan pasca bencana kabupaten.	Persentase penanggulangan bencana kabupaten terdiri dari; 1.-Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menghindari serta merespon bencana secara tepat. -Meningkatnya SDM masyarakat yang terampil dan tangguh terhadap bencana. 2.-Meningkatnya penanggulangan bencana pada kondisi darurat dan penyelamatan jiwa/ harta, lingkungan serta mengurangi dampak resiko bencana. -Terbentuknya tim pembinaan, pengarah dan tim koordinasi penanganan bencana. -Terselenggaranya sosialisasi dalam penanganan bencana. -Meningkatnya pemulihan sosek pasca bencana. 3.-Terselenggaranya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %



2.2.1 Program

Program-program untuk mewujudkan target sasaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 maka dalam Rencana Kinerja (RKT) dilaksanakan 6 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2018 sebanyak 6 program dan 25 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri kegiatan-kegiatan :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- 8) Penyediaan bahan bacaan dari peraturan perundang-undangan
- 9) Penyediaan makanan dan minuman
- 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri kegiatan-kegiatan:

- 1) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 2) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- 3) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung dan kantor
- 4) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
- 5) Pengadaan Pembelian Tanah



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1) Pengembangan SDM
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam:
 - 1) Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
 - 2) Pembentukan Tim Pembina, Pengarah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana.
 - 3) Pelatihan Mitigasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana
 - 4) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
 - 5) Pencegahan Dini Pengendalian Karhutla
 - 6) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - 7) Sosialisasi dan Patroli Gabungan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Mgosoft PDF Split Merge

Indikator Kegiatan yang terdiri dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) dituangkan dalam Formulir sebagaimana dalam lampiran.

2.2.2 Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja berisikan janji kepala SKPD untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah (5 tahunan) seperti yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis) SKPD.

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:



Tabel
Penilaian Capaian Kinerja

	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Presentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Mgosoft PDF Split Merge



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, melalui instrumen yang terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemetintah negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Mgosoft PDF Split Merge

3.1.1 Membandingkan antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja tahun 2018

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Fisik
1.	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana, responitas dalam pengamanan bencana dan meningkatkan pemulihan pasca bencana kabupaten.	Persentase penanggulangan bencana kabupaten terdiri dari; 1.-Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menghindari serta merespon bencana secara tepat. -Meningkatnya SDM masyarakat yang terampil dan tangguh terhadap bencana. 2.-Meningkatnya penanggulangan bencana pada kondisi darurat dan penyelamatan jiwa/ harta, lingkungan serta mengurangi dampak resiko bencana. -Terbentuknya tim pembinaan, pengarah dan tim koordinasi penanganan bencana. -Terselenggaranya sosialisasi dalam pananganan bencana. -Meningkatnya pemulihan sosek pasca bencana. 3.-Terselenggaranya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	89,49	92,86 %



1. Capaian Terhadap Target

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja anggaran yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Penyerapan belanja modal pada Tahun 2018 dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat Rrealisasi Keuangan sebesar Rp.57.73 %. Dikarenakan tidak direalisasikan Pembelian Sebidang Tanah dalam Kegiatan Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor, setelah adanya informasi dari BPKAD bahwa Basarnas mengajukan pengadaan tanah berlokasi dibelakang Terminal Pembengis, sehingga realisasi fisik menjadi 73.00 %.
- Sehingga realisasi Capaian Target **keuangan 89,49%** dan capaian **fisik 92.86%** masih rendah pada tahun 2018.
- Untuk tahun 2018, Indikator persentase penanggulangan bencana kabupaten dengan target 100% realisasi 89,49% dan fisik 92.86% dapat dikatakan berhasil nilai capaian kinerja.

Enda tahun 2018, dapat dikatakan berhasil, perhitungan ini berdasarkan pada jumlah bencana yang dapat ditangani atau ditanggulangi oleh Badan Penanggulangan Bencana di bagi jumlah bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut;

1) Kebakaran Hutan Lahan	=	66 kali
2) Kebakaran Permukiman	=	43 kali
3) Banjir	=	14 kali
4) Angin Putting Beliung	=	6 kali
5) Orang Tenggelam	=	2 kali
6) <u>Abrasi TAnggal</u>	=	<u>0 kali</u>
Jumlah bencana dan musibah	=	131 kali

Adapun jumlah kejadian bencana sepanjang tahun 2018 sebanyak 131 kali dan jumlah bencana yang dapat ditanggulangi atau ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana sebanyak = 131 kali kejadian.



3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Fisik		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	Persentase penanggulangan bencana kabupaten terdiri dari; 1.-Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menghindari serta merespon bencana secara tepat. -Meningkatnya SDM masyarakat yang terampil dan tangguh terhadap bencana. 2.-Meningkatnya penanggulangan bencana pada kondisi darurat dan penyelamatan jiwa/ harta, lingkungan serta mengurangi dampak resiko bencana. -Terbentuknya tim pembinaan, pengarah dan tim koordinasi penanganan bencana. -Terselenggaranya sosialisasi dalam penanganan bencana. -Meningkatnya pemulihan sosek pasca bencana. 3.-Terselenggaranya pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	96,09%	38,82%	89,49%	96,06%	93,19%	92,86%

- Indikator persentase penanggulangan bencana kabupaten dengan target 100%, dan persentase capaian sebesar 100% .
- Pada tahun 2016 jumlah bencana yang ditangani sebanyak 28 kali kejadian dan dapat ditanggulangi.
 - Serta Tahun 2017 jumlah bencana yang ditangani sebanyak 65 kali kejadian dan dapat ditanggulangi.
 - Sedangkan pada tahun 2018 jumlah bencana yang ditangani sebanyak 131 kali bencana dan musibah.



3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kejadian bencana merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana penyebabnya yang didominasi bencana kebakaran hutan dan lahan dikarenakan pada tahun 2018 terjadi Titik Panas (Hot Spot) Kawasan sebesar 52 dan APL 7 Jumlah 59 Kejadian, serta luas titik api (pemadaman) kawasan 17 dan APL 49 Jumlah 66 Kejadian, sedangkan Luas Kebakaran (Ha) kawasan 42.62 ha dan APL 163,47 ha jumlah 206,09 kejadian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sesuai dengan tupoksinya Badan Penanggulangan Bencana melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan pra bencana, saat bencana hingga pasca bencana dilakukan secara terpadu, terkoordinir dan menyeluruh serta dukungan kinerja tim yang cepat tanggap dalam merespon kejadian bencana sehingga secara umum program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana.

3.1.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

a. Sumber daya manusia

SDM Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah dapat dikatakan cepat tanggap dalam merespon kejadian bencana, namun demikian untuk lebih meningkatkan kualitas SDM tersebut tetap perlu diberikan pelatihan tentang kebencanaan.

b. Sumber daya peralatan

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD masih belum lengkap. Belum adanya markas TRC-PB milik BPBD dan belum tersedianya gudang logistik peralatan penanggulangan bencana. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana menganggarkan pembelian sarana dan prasarana penanggulangan bencana baik melalui dana APBD maupun APBN serta membuat proposal permohonan bantuan sarpras ke BNPB.

c. Sumber daya keuangan

Anggaran yang tersedia pada Badan Penanggulangan Bencana saat ini masih belum mencukupi, perlu adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.



3.1.5 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh 6 (enam) Program sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja anggaran yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Fisik %
1	2	3	4	5	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	614.728.350	596.259.729	97.00	97.18
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	887.930.828	512.617.200	57.73	73.00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48.500.000	47.780.000	98.52	100
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.000.000	16.000.000	100	100
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	28.200.000	28.200.000	100	100
6.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	8.848.518.369	8.145.642.851	92.06	86.98
	Jumlah tahun 2018	10.443.877.547	9.346.499.780	89.49	92.86

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja anggaran yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat total anggaran yang dialokasikan. Sebesar Rp.10.443.877.547.- sedangkan penyerapan anggaran sebesar Rp.9.346.499.780.- dari total anggaran.



- Penyerapan belanja modal pada Tahun 2018 dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat Rrealisasi Keuangan sebesar Rp.57.73 %. Dikarenakan tidak direalisasikan Pembelian Sebidang Tanah dalam Kegiatan Pengadaan Tanah dan Bangunan Kantor, setelah adanya informasi dari BPKAD bahwa Basarnas mengajukan pengadaan tanah berlokasi dibelakang Terminal Pembengis, sehingga realisasi fisik menjadi **73.00 %**.
- Untuk tahun 2018, Indikator persentase penanggulangan bencana kabupaten dengan target **100%** realisasi **89,49%** dan fisik **92.86%** dapat dikatakan berhasil sesuai tabel nilai capaian kinerja.

Solusinya :

- Uang yang tidak terealisasi pembelian sebidang tanah dikembalikan ke Pemerintah Daerah.

Mgosoft PDF Split Merge



BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami beberapa hambatan dan kendala sebagai berikut :

A. Permasalahan

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja anggaran yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Permasalahan yang muncul dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Penerapan SPM perlu didukung oleh Pemerintah Daerah baik dari sisi kebijakan (regulasi/peraturan) dan dukungan anggaran terutama untuk koordinasi dan pelaporan (penyediaan data).
2. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun yang berkualitas khususnya dalam hal kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BPBD.
3. Struktur organisasi saat ini belum memadai, dibandingkan dengan volume pekerjaan.
4. Masih kurangnya koordinasi efektif antar bidang dalam membangun kerja sama pada setiap pelaksanaan program prioritas yang dilaksanakan oleh BPBD.
5. Kurangnya koordinasi antar Bidang terkait penanggulangan bencana dalam hal pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi SKPD masing-masing khususnya pada saat tanggap darurat bencana terjadi.

B. Upaya Pemecahan Masalah

1. Penambahan Jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan untuk peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Struktural maupun diklat fungsional.
2. Peninjauan ulang struktur organisasi yang sudah ada



3. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh personil BPBD dengan cara menjalin komunikasi yang baik.
4. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ karyawan BPBD untuk mengikuti pelatihan.
5. Meningkatkan koordinasi antar bidang dan kerja sama dalam hal tanggap darurat
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* bagi karyawan dan karyawan serta mengaplikasikannya pada pendistribusian intensif berdasarkan beban kerja.

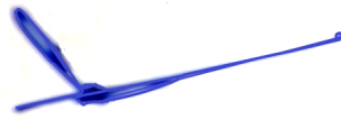
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan acuan untuk menjalankan tugas dan kinerja yang lebih baik dimasa mendatang dengan harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan, menjalankan kegiatan sesuai dengan program sehingga visi misi organisasi akan terwujud.

Kuala Tungkal, Februari 2019

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mgosoft PDF Split Merge

Drs. H. KOSASIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19591230 198103 1 008



Mgosoft PDF Split Merge

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018

[illegible]

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET	
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4				
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11	
Terwujudnya kaji cepat dan tepat di lokasi bencana Penanggulangan bencana	-Meningkatnya SDM masyarakat yang terampil dan tangguh terhadap bencana		100%			- Pelatihan mitigasi dan pemberdayaan masyarakat desa tangguh bencana	terbentuknya tim yang terarah dalam penanganan bencana	100%	- memberikan pelatihan kepada tim tentang penanganan bencana	29.089.750	Asmuni, SH				√	√									
Tersedianya informasi bencana yang akurat kepada masyarakat	- Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menghindari dan merespon bencana secara tepat	25%	25%	25%	25%	-Pencegahan dini dan pengendalian karhutla	terpenuhinya informasi bencana yang akurat kepada masyarakat	100%	- melakukan patroli gabungan - menyediakan informasi tentang bencana dengan memasang baliho & cetak leaflet	246.950.000	Asmuni, SH	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana	- Terselenggaranya sosialisasi penanggulangan bencana di desa rawan bencana			100%		-Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana	100%	- melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di desa rawan bencana	4.262.150.100	H.Budi Prasetyo N.W.	√	√	√	√	√	√								

Mgosoft PDF Split Merge

Kuala Tungkal, Pebruari 2018

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Drs. H. KOSASIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19591230 198103 1 008

ENERJA SASARAN TAHUN 2019

[illegible]

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET	
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4				
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11	
Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran					- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi antar instansi ke luar & dalam daerah	12 bulan	terpenuhnya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	467.622.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Tersedianya peralatan gedung kantor	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan peralatan Gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	20 unit	peralatan komunikasi Handy Talkie beroperasi maksimal	42.000.000	Suprpto, SH	√	√	√											
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.					- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	2 unit	gedung kantor mampu beroperasi maksimal	21.000.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Kendaraan/ dinas operasional dalam kondisi baik	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/rutin					- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional	terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	6 unit mobil 2 unit motor 2 unit roda dua 2 unit speed boat	kendaraan dinas/ operasional terpelihara dan mampu beroperasi sebagaimana mestinya	310.000.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur/rutin					- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	100%	peralatan gedung kantor mampu beroperasi maksimal	8.250.000		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Terlaksananya kebutuhan pakaian dinas	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur					Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan pakaian dinas - beserta perlengkapannya	terpenuhinya pakaian dinas dan kelengkapannya.	34 stel pakaian dinas, 55 pasang pakaian kerja lapangan	terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan lapangan kelengkapan	48.500.000 48.500.000	Suprpto, SH	√	√	√											
Meningkatnya kemampuan aparatur	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pengembangan SDM	terpenuhinya diklat untuk PNS	100%	terlaksananya diklat PNS keluar daerah	12.000.000 12.000.000	Suprpto, SH	√	√	√	√	√	√								

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET		
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4					
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11		
Tersedianya laporan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	15 buku	dokumen capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja tepat sasaran dan berkualitas	16.500.000 16.500.000	Suprpto, SH		√	√	√	√	√	√								

Kuala Tungkal, Februari 2019

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mgosoft PDF Split Merge

Drs. H. KOSASIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19591230 198103 1 008

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD	Keterangan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	APBD	APBD Prop	APBN	DAK		1/2/3	1/2/3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.01.01.10	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																	
3.01.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										609.615.958							
3.01.01.10.01.01	Penyedian jasa surat menyurat			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya penyediaan materai dan benda pos lainnya	100%	Tersedianya materai dan benda pos lainnya	12 bulan	Terpenuhinya Penyediaan materai dan benda pos lainnya	100%	900.000	0,00	0,00	0,00	900.000			
3.01.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	57.600.000	0,00	0,00	0,00	57.600.000			
3.01.01.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Tercapaiannya kebutuhan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	100%	77.500.000	0,00	0,00	0,00	77.500.000			
3.01.01.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Kantor terjaga kebersihannya	12 bulan	Terjaganya kebersihan kantor	100%	8.428.645	0,00	0,00	0,00	8.428.645			
3.01.01.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran /rutin	100%	Tersedianya alat tulis perkantoran	12 bulan	Terpenuhinya alat tulis perkantoran	100%	31.234.813	0,00	0,00	0,00	31.234.813			

3.01.01.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Tercapainya penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Terpenuhinya penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	26.700.000	0,00	0,00	0,00	26.700.000			
3.01.01.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan kantor	100%	4.460.500	0,00	0,00	0,00	4.460.500			
3.01.01.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya bahan bacaan dan majalah	12 bulan	Meningkatnya pengetahuan dan daya baca pegawai	100%	12.000.000	0,00	0,00	0,00	12.000.000			
3.01.01.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Tersedianya makan dan minuman rapat	12 bulan	rapat SKPD dengan baik	100%	2.400.000	0,00	0,00	0,00	2.400.000			
3.01.01.10.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi antar instansi di luar dan dalam daerah	12 bulan	Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	388.392.000	0,00	0,00	0,00	388.392.000			
3.01.01.10.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur										396.450.000				396.450.000			
3.01.01.10.02.12	Pengadaan peralatan Gedung kantor			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor	20 unit	Peralatan komunikasi Handy Talkie beroperasi maksimal	100%	50.000.000	0,00	0,00	0,00	50.000.000			
3.01.01.10.02.20	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	2 unit	Gedung kantor mampu beroperasi maksimal	100%	21.000.000	0,00	0,00	0,00	21.000.000			
3.01.01.10.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	6 unit mobil 2 unit roda tiga 22 unit roda dua 2 unit speed boet	Kendaraan dinas/ operasional terpelihara dan mampu beroperasi sebagaimana mestinya	100%	310.000.000	0,00	0,00	0,00	310.000.000			

3.01.01.10.02.26	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	Terpenuhiya pemeliharaan gedung kantor	100%	Peralatan gedung kantor mampu beroperasi maksimal	100%	15.450.000	0,00	0,00	0,00	15.450.000			
3.01.01.10.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										48.500.000				48.500.000			
3.01.01.10.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kabupaten Tanjab barat	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	100%	Terpenuhiya pakaian dinas dan kelengkapannya	34 stel pakaian dinas dan 55 pasang sepatu	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan kelengkapan	100%	48.500.000	0,00	0,00	0,00	48.500.000			
3.01.01.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur										16.000.000				16.000.000			
3.01.01.10.05.05	Pengembangan SDM			Kabupaten Tanjab barat	Tercapaianya peningkatan kapasitas sumber daya aparatus	100%	Terpenuhiya diklat untuk PNS	100%	Terlaksananya diklat PNS keluar daerah	100%	16.000.000	0,00	0,00	0,00	16.000.000			
3.01.01.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										51.900.000				51.900.000			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja			Kabupaten Tanjab barat	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	100%	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	15 buku	Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja tepat sasaran dan berkualitas.		51.900.000				51.900.000			
3.01.01.10.23	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										5.999.366.350				5.999.366.350			

3.01.01.10.23.06	Tanggap darurat penanggulangan bencana			Kabupaten Tanjab barat	Meningkatnya penanggulangan bencana pada kondisi darurat	100%	Penyelamatan jiwa/ harta dan lingkungan serta mengurangi dampak resiko bencana	100%	- Merespon semua kejadian bencana secara cepat dan tanggap - Mendirikan dapur umum	100%	1.346.476.500	0,00	0,00	0,00	1.346.476.500				
3.01.01.10.23.21	Pembentukan tim Pembina dan pengarah tim koordinasi penanggulangan bencana			Kabupaten Tanjab barat	Terbentuknya tim Pembina dan pangarah tim koordinasi penangulungan bencana	100%	Terpenuhinya tim Pembina dan pengarah tim koordinasi penanggulangan bencana	1 tim	- Membuat surat keputusan tentang penetapan tim, tim Pembina dan pengarah, tim koordinasi - Melaksanakan rapat koordinasi penangan bencana	100%	114.700.000	0,00	0,00	0,00	114.700.000				
3.01.01.10.23.07	Pelatihan mitigasi dan pemberdayaan masyarakat desa tangguh bencana			Kabupaten Tanjab barat	Meningkatnya SDM masyarakat yang terlampir dan tangguh terhadap bencana	100%	Terbentuknya tim yang terarah dalam penangan bencana	100%	Memberikan pelatihan kepada tim tentang penanganan bencana	100%	29.089.750	0,00	0,00	0,00	29.089.750				
3.01.01.10.23.13	Pencegahan dini pengendalian karhutla			Kabupaten Tanjab barat	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menghindari dan merespon bencana secara tepat	100%	Terpenuhinya informasi bencana yang akurat kepada masyarakat	100%	- Melakukan patroli pengalungan - Melakukan informasi tentang bencana dengan memasang baliho dan cetak leaflet	100%	246.950.000	0,00	0,00	0,00	246.950.000				
3.01.01.10.23.19	Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana			Kabupaten Tanjab barat	Terselenggaranya sosialisasi penanggulangan bencana di desa rawan bencana	100%	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana	100%	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di desa rawan bencana	100%	4.262.150.100	0,00	0,00	0,00	4.262.150.100			Hibah BNPB (APBN)	
TOTAL												7.121.832.308				7.121.832.308			



LAMPIRAN

1. LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU-OPD) TAHUN 2019
3. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019
4. CASCADING TAHUN 2019
5. RENCANA AKSI KINERJA

Mgosoft PDF Split Merge

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018



Mgosoft PDF Split Merge